

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Gunawan Setiardi, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- A.W. Widjaja, 2002, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus Budi Santosa, 2022, *Sosialisasi Pengawasan Keuangan Daerah*, Semarang: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat.
- Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin Widjaja Tunggal, 2009, *Pokok-pokok Audit Kecurangan*, Jakarta : Harvarindo.
- Ardani, N. 2020. *Pengaruh Kredibilitas Influencer Terhadap Keputusan Pembelian (Survei Pada Konsumen Billionaires Project Di Kelurahan Bintaro)*. Doctoral dissertation, Universitas Bakrie.
- Ateng Syafrudin, 2000, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan.
- Azzadina, I., Huda, A. N., & Sianipar, C. P. M. 2012. *Understanding relationship between personality types, Marketing-mix factors, and purchasing decisions*. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*.
- Baharuddin Aritonang, 2016, *BPK dalam Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Baik*, Pustaka Pergaulan.
- \_\_\_\_\_, 2017, *BPK dalam Sistem Ketatanegaraan*, Kepustakaan Populer Gramedia.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- Fayol, Henry, 1985, Industri dan Manajemen Umum, Terj. Winardi, London: Sir Issac and Son.
- Hani Handoko, 1999, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Rafika Aditam.
- Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel), Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Indroharto, 1994, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, 2004, Ctk. Kesatu, Yogyakarta: FH UII Press.
- Kemenkes, 2020, Biaya Pengobatan Pasien, Jakarta: legalitas.
- Kementerian keuangan Republik Indonesia, 2020, Tentang Penyaluran DBH, DAU, dan Insentif daerah, Jakarta: Legalitas.
- Kementerian keuangan Republik Indonesia, 2020, Tentang Penyaluran Dana Alokasi, Jakarta: legalitas.
- Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, 1988, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- LHP BPK Nomor 53/LHP/XVIII.PDG/12/2020 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- LHP BPK Nomor 40.A/LHP/XVIII.PDG/05/2021 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- M. Manullang, 1977, Dasar-dasar Management, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- M. Djafar Saidi dan Eka M Djafar, 2017, Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik, Ctk. Kelima, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- M. Subagio, 1991, Hukum Keuangan Negara RI, Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Yusuf John Dwi Setiawan S., 2009, Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia.
- Mardiasmo, 2012, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi.
- Miriam Budiardjo, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ni'Matul Huda, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: Nusa Media.
- Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Management, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
- Hendra Kariaga, 2013, Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Prenada Media Group.
- Putra Astomo, 2014, Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Mamuju: Kanun Jurnal Ilmu Hukum.
- Rasul Syahrudin, 2012, Pengintegrasian Sistem Akuntansi Kinerja dan Anggaran, Detail Rekod, Jakarta.
- Rasul, Syahrudin, 2003, Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara, Jakarta: PNRI.
- Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024
- Riawan Tjandra, 2006, Hukum Keuangan Negara, Jakarta : Grasindo.
- Rusadi Kantaprawira, 1998, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Robert Klitgaard, 2001, Membasmi Korupsi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2010, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Jakarta: Rajawali Press.

Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Pilihan atas Federalisme atau Negara Kesatuan, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Siswanto Sunarso, 2005, Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif di Daerah, Bandung: Mandar maju.

Soedarmin dan Subagio, 1991, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Buku, Malang: Jurusan Manajemen FE UM.

Sudin Siahaan, 2012, Menuju BPK Idaman, Jakarta: Prenada Media Group.

Sunardi, N., Hamid, A. A., Lativa, A. K., & Tulus, N, 2018, Determinant Of Cost Efficiency And It's Implications For Companies Performance Incorporated In The Lq. 45 Index Listing In Idx For The Period of 2011-2016. International Journal of Applied Business and Economic Research, 16(1).

Suwari Akhmaddhian, 2018, Asas-asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk mewujudkan Good Governance, Kuningan: Journal of Multidisciplinary Studies.

Suwoto Mulyosudarmo, 1990, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Jakarta: Universitas Airlangga.

Stout HD, 2004, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung: Alumni.

Titik Triwulan Tutik, 2015, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Prenadamedia Group.

W. Gulo, 2010, Metode Penelitian, Jakarta: Grasindo.

W. Riawan Tjandra, 2006, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Grasindo.

## **B. Peraturan Perundang-Uundangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Keuangan Negara di Masa Pandemi *Covid-19*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*

Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/pmk.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PER-1663/KJF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPR RI.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insenti dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019*.

### C. Jurnal

Fitri Rahmawati, Dampak *Covid-19* Terhadap Kinerja Keuangan Daerah, Semarang; Diponegoro Journal of Accounting, 2022.

Glory Augusta dan Lilis Ardini, Pemeriksaan Keuangan Negara pada Masa Pandemi *Covid-19*, Banten; Jurnal Sekuritas, 2020.

Hendra Karianga, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Alumni, Bandung, 2011.

Ikhwan Fahrojih dan Mokh. Najih, Menggugat Peran DPR dan BPK Dalam Reformasi Keuangan Negara, In Trans Publishing, Malang, 2008.

Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta, 2006.

Zimmerman, J. L. (1977). The municipal accounting maze: an analysis of political incentives. *Journal of Accounting Research*, 107-144.

